

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik Teori dan Standar Akuntansi Sektor Publik teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang didalarnnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu:

- 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*).
- 2) Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*).
- 3) Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Indra Bastian (2014:6) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara serta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan Menurut Erlina,dkk (2015) Akuntansi Sektor Publik adalah proses

pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah, universitas dan lain-lain.

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu:

1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini.
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan.
3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*).

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Juwita, 2013). Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pradono dkk, 2015).

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasi standar

untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik

Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.

Peran akuntansi Sektor publik *American Accounting Association* (1990) dalam *Glynn* (1993) menyatakan peran akuntansi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program

dan penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah atas penggunaan dana public

Tujuan Akuntansi Sektor Publik Menurut Hartoto (2023: 32) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Kontrol yaitu sebagai pengendali manajemen dan akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien serta memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah di andalkan dalam lembaga publik.
2. Akuntabilitas yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik, *accountability* digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggungjawab atau sumber daya atau bidang atau divisi yang berada dalam wewenang manajer tersebut.

2.1.2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan dari berbagai macam sumber daya yaitu manusia dan juga peralatan yang memang dibuat untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Pada dasarnya suatu sistem informasi yang berbasis komputer diarahkan untuk menyajikan informasi yang dapat dipercaya, relevan tepat waktu lengkap, dapat dipahami dan teruji. Sedangkan tujuan dari sistem informasi akuntansi yaitu sebagai pusat pertanggungjawaban, mendukung

operasional sehari-hari dan sebagai dasar pengambilan keputusan. (Irafah Sari dkk, 2018)

Menurut (Ismail & Sudarmadi, 2019) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah mengamankan aset atau kekayaan perusahaan, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan, menghasilkan untuk pihak eksternal, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja pegawai, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran organisasi dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

2.1.3. Tujuan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian

Tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung aktivitas pemerintahan
2. Mendukung proses pengambilan keputusan
3. Membantu pengelolaan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya kedalam sistem informasi akuntansi

4. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi kedalam sistem informasi akuntansi
5. Mengolah data transaksi
6. Menyimpan data untuk tujuan dimasa mendatang
7. Mengontrol semua proses yang terjadi
8. Memperbaiki kualitas informasi
9. Memperbaiki pengendalian internal
10. Meminimalkan biaya yang berkaitan.

2.1.3.1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi akuntansi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Saat ini pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem akuntansi sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan yang telah tersistem dengan menggunakan komputersasi diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

2.1.3.2. Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah menurut (Yuliani, dkk, 2010) terdiri dari 7 komponen yaitu sebagai berikut:

1. Relevan
2. Tingkat keamanan
3. Informasi dapat mendukung keputusan manajemen
4. Dapat dipercaya
5. Informasi akuntansi dapat terkontrol secara formal maupun material dari segi validitasnya
6. Lengkap
7. Informasi akuntansi tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.

2.1.4. Sistem Pengendalian Internal

IFAC (*International Federation Of Accountants*) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami dan diawasi oleh tingkat pimpinan manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data, menegakkan disiplin, meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

Meunurut Romeney dan Paul (2012:229) pengendalian internal (*internalcontrol*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan

untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian internal (*Internal Controlstructure*) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.

Sedangkan *Comite Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission* (COSO) (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, manajement, and other personnel, disegned to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations. Reporting, and compliance.

Berbeda dengan teori yang dikemukakan Sunyoto (2014) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebuah sistem dimana sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Selain itu, menurut Sunyoto bahwa komponen pengendalian internal dapat dikategorikan menjadi tiga kategori dasar yaitu:

1. Lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian.

2. Sistem akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol seluruh transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi tujuan audit umum atas transaksi tersebut.
3. *Prosedur pengendalian* yaitu aktivitas pengendalian berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada dalam organisasi.
4. Pimpinan harus mampu merencanakan, sesuai yang diinginkan apabila suatu pengendalian internal tidak dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian yang diinginkan maka proses pengendalian tidak berjalan secara efektif.

Berbagai penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengendalian internal harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui sebuah sistem yang telah didesain sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan baik dan benar. Hal ini perlu dilakukan karena dapat mengurangi tingkat kecurangan diantaranya penyalahgunaan wewenang dan melakukan penyajian laporan keuangan yang salah.

2.1.4.1. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Indikator dalam Sistem Pengendalian Internal menurut Sudarmanto (2021:09) terdapat lima komponen pengendalian internal pada pernyataan *Comite Of*

Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO) yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Pengendalian Internal yang kurang baik dapat mengakibatkan sulitnya mendeteksi kecurangan pada proses akuntansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fathia & Agustiningtyas, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:02) salah satu pilar utama tegaknya prekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah amanah yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Dalam masyarakat yang maju peradabannya pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis penyajian laporan

keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya, terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu:

1. Dari sisi internal laporan keuangan merupakan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat investor kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu

dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi- informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

2.1.5.1 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:06) jika laporan keuangan publikasian itu di eksplorasikan dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik manfaat laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan- perubahan yang telah dan akan terjadi
3. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial organisasional:
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kinerja yang telah ditetapkan

- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas operasi program aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan.
- c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*)

2.1.5.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah harus berupaya memperbaiki kualitatif laporan keuangannya. laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri- ciri berikut:

1. Relevan (*relevance*) artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.

Relevansi laporan keuangan terkait dengan:

- a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja dimasa datang
- b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang
- c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

2. Andal (*Reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a. Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan
 - b. Dapat diverifikasi, yaitu penyajian laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - c. Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*understandability*) laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

2.1.5.3. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya PP.No 7 tahun 2007. Indikator kualitas laporan keuangan Menurut (Mahmudi, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami

2.1.6. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ahmad (2008) untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem informasi pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan peran pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya.

Agus Wiratama (2022) telah melakukan penelitian pada OPD Kabupaten Karangasem hita, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keupemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah.

2.1.6.1 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya hasil audit terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang baik. Penyusunan laporan keuangan yang baik didukung dengan pengawasan internal yang baik pula, sistem pengendalian internal sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang diharapkan dapat memberikan keyakinan, efektif dalam kualitas laporan keuangan. Keandalan pelaporan merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal yang kurang baik dapat menyebabkan suatu penemuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang masih ditemukan penemuan-penemuan berarti belum dapat mendapatkan opini yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah harus memperhatikan dalam sistem pengendalian internal agar mendapat laporan keuangan pemerintah yang baik.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengevaluasi dan mengukur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya penggelapan dan kecurangan. Penelitian Syamsul Bahri (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.6.2. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik informasi maka dijabarkan sebagai suatu teknik untuk menghimpun, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan cara memaksimalkan teknologi informasi untuk menumbuhkan jaringan informasi manajemen serta proses kerja pemerintah secara sistematis untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, berdasarkan hal tersebut sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya hasil audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal yang baik, sistem pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya suatu organisasi dan pencegahan serta mendeteksi adanya kecurangan. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang diharapkan dapat memberikan keyakinan efektif dalam kualitas laporan keuangan. Keandalan pelaporan merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal yang kurang baik dapat menyebabkan suatu penemuan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan yang masih ditemukan penemuan- penemuan berarti belum dapat mendapatkan opini yang baik oleh BPK, dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan dalam sistem pengendalian internal agar mendapatkan laporan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Kanita (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti	Judul Penelitian Jurnal Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang diteliti, Alat analisis dan Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Wiratama	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten	Variabel Bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Akuntansi • Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi • Sistem Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi linear berganda • Pengambilan data dengan koesioner • Menggunakan jenis data primer yang diolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Jumlah responden dalam penelitian • Teknik yang digunakan

		<p>Karangasem hita Akuntansi & Keuangan Universitas Hindu indonesia Edisi Januari tahun 2022</p>	<p>Internal</p> <p>Variabel Terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan <p>Alat analisis: Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>1.Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>2. Sistem Informasi</p>	<p>menggunakan alatbantuan program SPSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan <i>Porpositive Sampling</i> 	<p>dalam pengambilan sampel</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>3.Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>		
2.	Septony Siahhan,ddk	<p>Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem</p>	<p>Variabel Bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah • Pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda • Menggunakan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Jumlah responden dalam penelitian

		<p>Pengendalian Internal pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jurnal Manajemen Volume 2. Nomor.2 Tahun 2022.</p>	<p>Standar Akuntansi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Internal <p>Variabel terikat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan. <p>Alat analisis: Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda</p> <p>Hasil Penelitian: 1.Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian
--	--	---	--	--	--

			<p>berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>3. Sistem Pengendalian Internal pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Keuangan</p> <p>4. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>		
3.	<p>Niluh</p> <p>WayanTiya</p> <p>Lestari</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Pemanfaatan Sistem Informasi</p>	<p>Variabel Bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisi Regresi Linear Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Jumlah

		<p>Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintahan Kabupaten Bandung, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.11, NO. 2 Januari Tahun 2020,pp.170-178.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi Akuntansi • Sistem pengendalian internal <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan keuangan, <p>Alat analisis: Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda</p> <p>Hasil penelitian: 1.hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan data dengan koisioner • Menggunakan jenis data primer yang diolah menggunakan alat bantuan program statistik dengan pengujian analisis data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis • Teknik pengambilan 	<p>responden dalam penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengambilan sampel
--	--	---	---	---	---

			<p>pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di BKAD Kabupaten Bandung</p> <p>2. pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>	<p>sampel menggunakan <i>porposive sampling</i></p>	
--	--	--	--	---	--

4.	Lailatur Rohman,dkk.	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang E-JRA.	<p>Variabel Bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah • Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah • Sistem Pengendalian Internal <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan <p>Alat analisis:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda • Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive sampling</i> • Data yang diambil menggunakan metode Koesioner 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Jumlah responden dalam penelitian
----	-------------------------	--	--	---	--

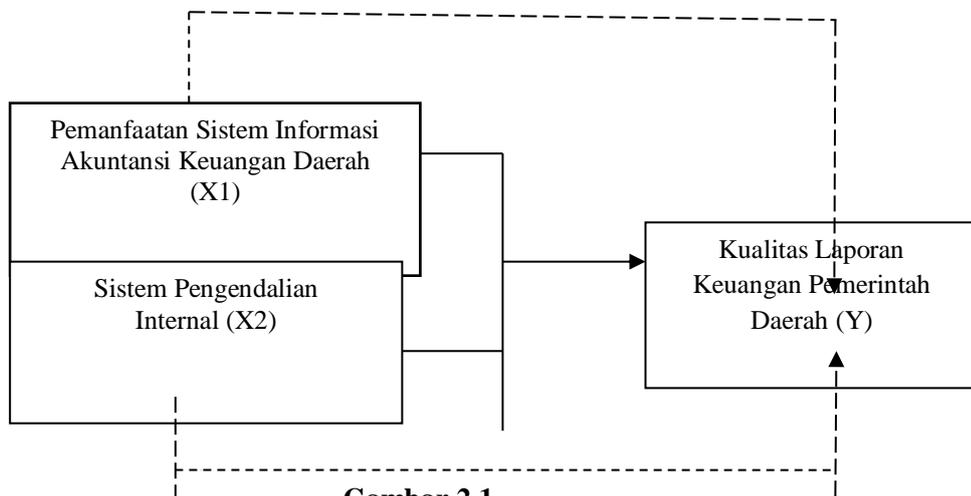
		Volome. 09. Nomor.05 Agustus Tahun 2020	Anaisis Regresi Linear Berganda Hasil penelitian: <ul style="list-style-type: none">• Secara simultan pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah,dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif		
--	--	--	---	--	--

			terhadap kualitas laporan keuangan.		
5.	Syamsul Bahri,dkk	Pengaruh pemanfaatan sistem informasi Akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kaulitas laporan keuangan pemerintah pada KPRI Universitas Negeri Malang Riset&Jurnal program studi akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya	<p>Variabel Bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah • Sistem Pengendalian Internal <p>Variabel Terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan keaungan <p>Alat analisis: Menggunkan Analisis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda • Pengambilan data dengan koesioner • Jenis data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah penelitian • Metode penelitian • Jumlah sampel yang di gunakan

		Gama, Indonesia Volume.3. Nomor 2 juli-desember Tahun 2022	Regresi Linear Berganda Hasil Penelitian: Menunjukkan Bahwa pemanfaatan sistem informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.		
--	--	---	---	--	--

2.3. Kerangka Pikir

Dalam Penelitian ini menggunakan dua variabel yang mempengaruhi yaitu Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) dan variabel yang dipengaruhi yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang merupakan variabel yang di pengaruhi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka pikir

Keterangan:

-----> : Secara Parsial

————> : Secara Simultan

2.4. Hipotesis

Menurut Sujarweni (2016:66) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah

dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BKAD) Kabupaten OKU.